

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan, penelitian ini menjelaskan tentang Evaluasi Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018. Dengan melihat pada instrumen-instrumen Anggaran Berbasis Kinerja, yaitu : target kinerja, tolok ukur kinerja, Analisis Standar Belanja, Standar Satuan Harga, Standar Pelayanan Minimal (SPM). Berdasarkan hasil penelitian telah ditemukan bahwa:

- a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja sebagai suatu sistem penganggaran yang berfokus pada hasil yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan dalam pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah sepenuhnya menerapkan instrumen-instrumen yang ada dalam Anggaran Berbasis Kinerja. Dalam penerapannya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu provinsi Tenggara Timur sudah menerapkan instrumen Anggaran Berbasis Kinerja yakni : target kinerja, tolok ukur kinerja, Standar Satuan Harga, Analisis Standar Belanja dan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

## **6.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian maka saran yang diajukan adalah sebagai berikut :

- a. Bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur mengenai penggunaan instrumen-instrumen Anggaran Berbasis Kinerja yang telah diterapkan dalam proses pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan sudah dapat dikatakan baik, efektif dan efisien dengan menggunakan instrumen-instrumen Anggaran Berbasis Kinerja yakni : target kinerja, tolok ukur kinerja, Analisis standar Belanja, Standar Satuan Harga dan Standar Pelayanan Minimal. Maka diharapkan agar dalam proses pengelolaan keuangan daerah ini harus di pertahankan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hailm dan Muhammad iqbal, 2012. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah, Edisi Ketiga*. Yogyakarta: Penerbit UPP AMP YKPN
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga*. Penerbit. Erlangga: Jakarta.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi Revisi, Jakarta, Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Halim, Abdul & Theresia Damayati. 2007, *Pengelolaan Keuangan Daerah Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*, Edisi Kedua, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Mahmudi, 2006. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, Penerbit: Erlangga, Yogyakarta.
- Mahmudi, 2011. *Manajemen Keuangan Daerah*. Erlangga, Jakarta.
- Mahsun, M. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : BPFE
- Mardiasmo, 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Andi.
- Nordiawan, Dedi. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Permendagri No. 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan Keuangan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah*
- Peraturan pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang pengelolaan Keuangan Daerah.*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah.*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah.*
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.*
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.*

*Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*

Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D* . Bandung. Alfabeta.

Sulistio, Eko Budi. 2010. Proses Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Way Kanan). *Jurnal ilmiah Administrasi publik dan pembangunan*. Vol 1, No 1

Robinson, Last. 2009. Model Dasar penganggaran Berbasis kinerja. Catatan Teknis dan Manual. Dana Moneter internasional. Washington.